

3. Perlunya diadakan pembekalan materi aset tetap sesuai SAP dari pemerintah baik pelatihan teknis atau workshop kepada para pegawai yang bersangkutan dalam penerapan PSAP aset tetap. Agar pegawai bisa lebih memahami pelaksanaan teknis aktivitas aset tetap, penyusunannya dan pelaporan secara baik dan sesuai dengan maksud dari PSAP tersebut.



IKOPIN

DAFTAR PUSTAKA

Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

- Pranadjaja, M. R. (2003). Hubungan Antar Lembaga Pemerintahan. *Jakarta: Sinar Grafika.*
- Muhadam Labolo. (2007). Memahami Ilmu Pemerintahan, *Jakarta: Kelapa Gading Permai.*
- Hery. (2009). Pengertian Akuntansi Menurut APB Statement No.4 tahun 1970. Teori akuntansi, *Jakarta: Kencana*
- L Suparwoto. (1990). Akuntansi Keuangan Lanjutan, Edisi 1, *Yogyakarta: BFE*
- Suwardjono. (2015). Teori akuntansi perikayasaan laporan keuangan, Edisi 3. *Yogyakarta: BPFE.*
- Winarno Surakhmad. (1985). Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik. *Bandung: Tarsito.*
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. *Bandung: Alfabeta.*
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). *Bandung: Alfabeta.*
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. *Bandung: Alfabeta*
- Nasution. (1998). Metodologi penelitian kualitatif. *Bandung: Tarsito.*

- Iskandar. (2008). Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif). *Jakarta: GP Press.*
- Moh Nizar. (2009). Metode Penelitian, *Bandung: Ghalia Ikapi*
- Widiyanti, A. (2017). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa: Studi Pada Desa Sumberejo Dan Desa Kandung Di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan (*Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*).
- Rafid, R. Z. (2016). Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Pemerintahan Kabupaten Bone) (*Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*).
- Lubis, S. M. Y. (2019). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Pertanggungjawaban Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Usortolang Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal) (*Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*).
- Asri, P. P. (2019). Analisis Penerapan PSAP 07 Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Utara. (*Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*).

Fitriyanto, M. (2008). Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No.07
Tentang Aset Tetap Pada Pemerintah Kota Tangerang. (*Doctoral dissertation,*
Universitas Marcubwana)

Peraturan

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2003 Keuangan Negara

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi
Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor I/PMK.06/2013 Petunjuk Pelaksanaan Lelang

IKOPIN